

Penghapusan UWT Makin Kuat

► Masyarakat tak Perlu Dibebani Pembayaran Ganda

BATAM, TRIBUN - Wali Kota Batam, Rudi, enggan mengomentari soal wacana pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) atas lahan permukiman masyarakat di Batam. Ditemui usai menjadi inspektur upacara di acara pernikahan yang berlangsung di Asrama Haji, Batam Center, Rudi, lebih memilih pergi.

"Ayo jalan," kata Rudi dari dalam mobil, meminta sopirnya segera berlalu dari wartawan, Kamis (8/3).

Padahal sebelumnya, dalam beberapa kali kesempatan, Rudi termasuk orang yang paling mempertanyakan. Dia ingin UWT dihapuskan untuk lahan permukiman.

Dengan begitu, masyarakat tak perlu lagi dibebani dengan double pembayaran. Satu ke Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), satu lagi pembayaran UWT. pun, rumah yang kini ditempati masyarakat secara legal, bisa diwariskan kepada anak cucunya. Bukan justru mewarisi utang UWT, bagi masyarakat yang tak mampu membayar.

Tak hanya mendengungkan agar UWT untuk permukiman bisa dihapuskan, Rudi juga mendorong agar percepatan transisi status Batam dari Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bisa segera dilakukan.

"Dengan begitu, industri biar jadi urusan BP Batam. Tapi di luar itu untuk permukiman, bisa diurus Pemko Batam," katanya, dalam berbagai kesempatan, beberapa waktu lalu.

• ke halaman 19

Tergantung Menko dan Presiden

SEMENTARA Senator asal Kepri, Hardi Selamat Hood menilai, Uang Wajib Tahunan (UWT) untuk lahan permukiman di Batam, sebaiknya dibebaskan. Meskipun untuk penerapannya tak bisa langsung keseluruhan, melainkan bertahap.

"Kita lihat di Yogyakarta dengan konsep sultannya, tanah untuk rakyat diberikan dan itu statusnya hak milik, bukan Hak Guna Bangunan (HGB). Mestinya di Batam juga seperti itu, tanah untuk rakyat statusnya hak milik," kata Hardi ditemui usai menghadiri acara pernikahan di Asrama Haji Batam Center, Kamis (8/3).

• ke halaman 19



BERI PENJELASAN - Kasat Bimas Polresta Barelang, Kopol S. Dalimunthe meredakan amarah sopir angkutan kota saat melakukan aksi unjuk rasa di Depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (8/3). Ratusan sopir menolak keberadaan taksi online yang mengambil dan menurunkan penumpang di lokasi trayek.

Dorong Pemerintah Cepat Tangani

► Taksi Online dan Plat Kuning Masih Bergolak

BATAM, TRIBUN - Kisruh taksi online di Batam tak kunjung selesai. Dari waktu ke waktu ada saja gejolak penolakan terhadap keberadaan taksi online. Terkait persolan ini Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, dalam hal ini percepatan dan kesempatan pemerintah dalam memfasilitasi, menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dia melihat pemerintah masih kurang cepat

memberikan respon.

"Karena suka atau tak suka, pemerintah harus menyesuaikan keperluan dan kebutuhan," ujar Nuryanto di ruangan kerjanya, Kamis (8/3).

Fakta yang terjadi, lanjutnya, sebelum ada izin operasional angkutan, taksi online sudah beroperasi di jalan. Di sini, kebijakan dari pemerintah lagi-lagi diperlukan.

"Mestinya pemerintah walaupun lambat, tapi setelah ada instruksi bisa cepat menyelesaikannya. Jangan bertele-tele," kata Nuryanto. Dia meminta, sebelum persoalan taksi online di Batam bertambah ramal, mestinya ada solusi yang diberikan.

"Jangan sampai menunggu setelah ramad baru sibuk. Sekarang intikan kejar-kejaran antara regulasi dan kemajuan teknologi.

Sementara teknologi ini perkembanganannya cepat," ujarnya.

Dia membenarkan kisruh taksi online ini sebelumnya tidak hanya terjadi di Batam. Melainkan ada juga di beberapa kota besar. U antara kota itu, menurutnya sudah ada yang bisa menyelesaikan kisruh taksi online dan angkutan konvensional lainnya.

• ke halaman 19

Perkembangan terbaru-nya, saat rapat koordinasi membahas BP Kawasan Batam di Jakarta dengan kementerian terkait kemarin, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, salah satu pembahasan dalam rapat itu, mengenai rumah susun (rusun).

Menyikapi semakin terbatasnya lahan di Batam, sementara masyarakat membutuhkan tempat tinggal, Lukita mengatakan, arah pembangunan Batam ke depan akan diisi dengan hunian vertikal.

"Kami ingin ada sarana dan prasarana vertikal yang dibangun. Kementerian Pekerjaan Umum mendukung hal itu," kata Lukita.

Tinggal bagaimana BP Batam menyiapkan lahannya. Sementara Kementerian PU PR akan membangun rusun. Soal wacana pembebasan

UWT ini, kendatipun hal itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, tampaknya BP Batam juga berat untuk melepaskannya.

Apalagi selama ini, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BP Batam memang paling banyak berasal dari UWT. Tahun 2015 lalu saja, BP Batam berhasil menyatorkan uang negara sebesar Rp 986 miliar dari PNBP. Angka itu jauh dari target Rp 760 miliar.

Dari realisasi itu, PNBP dari UWT mencapai Rp 400an miliar. Disusul dari pelabuhan sebesar Rp 204 miliar, sedangkan dari bandara sebesar Rp 149 miliar.

Sebelumnya, Lukita mengatakan, sesuai aturannya semua tanah di Batam merupakan tanah negara dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Tak ada masyarakat yang punya hak milik.

"Menurut Kepres Nomor 41

tahun 1973, semua lahan di Batam adalah lahan negara. Bahwa ada proses pembelian dan penggantian, itu terjadi di masa itu. Karena itu HPL-nya diserahkan kepada BP Batam sebagai pengelola," ujarnya.

Dalam ketentuan tersebut juga, lanjutnya diatur, BP Batam bisa memberikan beban uang UWT kepada masyarakat. Pendapatan dari UWT itu digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Batam. Termasuklah untuk melakukan pembersihan, pematangan, penyiapan infrastruktur dan sebagainya.

"Itulah mengapa BP Batam sebagai pengelola diberikan kewenangan memungut UWT. BP Batam hanya menjalankan tugas sesuai ketentuan yang ada. Kalau pemerintah memutuskan dihapuskan, itu akan ada di tangan pemerintah," kata Lukita memberi penjelasan. (wie)

jazz yang di gelar rutin setiap hari Rabu dan Jumat dari pukul 10:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB.

"Tujuan kita untuk menghibur para pengunjung yang datang ke Bandara. Jadi penumpang yang datang maupun pengunjung yang menjemput akan terhibur. Karena kita tempatkan di depan jalur pintu kedatangan," terang Suwarso.

Untuk gelaran musik, Suwarso menambahkan, tidak ada batasan bagi musisi Kota Batam yang ingin manggung dan mencoba suasana baru di bandara, khususnya kepada para pemusik khas Melayu.

"Karena saat ini yang baru daftar aliran musik jazz. Kalau yang lain mau masuk dan daftar kita terbuka," katanya. (egw)

Kecuali untuk lahan peruntukkan bisnis, dan industri, menurutnya tak masalah diberikan HGB, dan sifatnya menyewa. Jika dikaitkan dengan lahan permukiman, ini berkaitan dengan warisan yang diturunkan orangtua kepada anaknya.

"Kalau orangtua bayar UWT 20 tahun, kemudian anak dapat warisan. Kalau anaknya tak mampu bayar

bagaimana? Berarti kan tanah di Batam tak bisa diwariskan," ujarnya.

Namun terlepas dari warisan ini, Hardi mengatakan, muaranya memang ada di tangan Presiden. Sebab berkaitan dengan BP Batam, hierarkinya berada di Menko Perekonomian dan Presiden. Bukan ke parlemen. Sehingga perubahan apapun itu berkaitan dengan tugas dan

Dorong Pemerintah

"Di Jakarta sudah ada ruju-kannya. Kita lihat keahadirannya berjalan aman," kata Nuryanto.

Sementara pertemuan perwakilan Persomet dengan Wali Kota Batam, Rudi tak sepenuhnya berjalan mulus. Ada yang tidak puas, saat hasil pertemuan dari perwakilan maupun Kepala Dinas Perhubungan disampaikan kepada rekan-rekan Persomet yang menunggu di depan Gedung Pemko Batam.

Sampai-sampai situasi di luar sempat memanas. Terjadi keributan kecil di antara sesama Persomet.

"Kalau kami ketemu taksi online, kami akan hancurkan saja. Biar tahu rasa. Ini masalah perut," teriak seorang di antaranya.

Ada lagi yang meminta rekan-rekan yang lain untuk

membubarkan diri. Karena solusi yang diberikan tak seperti yang mereka harapkan.

"Kosong-kosong. Bubar... bubar," teriak lainnya.

Sebelum situasi lebih memanas, Kapolsek Batam Kota, Kopol Firdaus segera mengambil alih situasi.

"Kalau ada yang belum puas. Silakan dirapatkan di kelompoknya. Nanti perwakilan ketemu kadishub. Tapi aspriasi kawan-kawan hati ini sudah kami fasilitasi," kata Firdaus.

Dia berharap rekan Persomet bisa membubarkan diri dengan tertib. Begitupun tidak melakukan pelanggaran hukum.

"Jangan lakukan pelanggaran hukum. Kalau tak bisa kontrol emosi akan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Risiko tanggung masing-masing," ujarnya mengingatkan.

peranan BP Batam, akan diputuskan oleh Presiden.

"Kita berharap Presiden bisa segera mengambil kebijakan. Karena sesungguhnya BP Batam ini hanya pelaku saja, yang diperintahkan dengan konstitusi dari pusat," kata Hardi.

Di sisi lain, Hardi tak memungiri saat ini UWT termasuk penerimaan negara bukan pajak yang terbesar di

BP Batam. Karena itu, jika pun akan diterapkan, bisa dimulai secara bertahap untuk tanah permukiman.

"Mari kita berhitung berapa UWT yang dibayar rakyat, berapa UWT dari industri. Kalau dihapuskan untuk rakyat, berapa nominal kehilangannya. Berapa sumber yang bisa didapat dari sumber yang lain. Sumber lain juga mesti dikembangkan," ujarnya. (wie)

kan.

Firdaus juga mengingatkan, apabila rekan Persomet bertemu dengan taksi online di jalan, agar segera melapor ke pihak kepolisian. Supaya bisa diambil tindakan.

"Serahkan ke kepolisian. Jangan anarkis," kata Firdaus.

Sekitar pukul 11.43 WIB, puluhan sopir carry yang tergabung di Persomet membubarkan diri.

"Setelah ini kita akan lakukan rapat lagi," kata seorang di antara mereka.

Dalam pertemuan aksi damai Persomet juga dijamu oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa. Ia menjelaskan berbagai informasi terakhir mengenai perizinan kendaraan plat hitam.

Aplikator (Grab, Gojek, dan lainnya) hanya sebagai

penyedia aplikasinya saja. Yang mengizinkan adalah badan usaha. Sebenarnya tak boleh rekrut sembarangan. Yusfa mengakui sebenarnya sesama online juga sudah ada ribut.

"Kita sudah menyurati aplikasi supaya jangan sembarangan merekrut. Agar tak terjadi seperti ini. Tapi tetap saja mereka melakukan," kata Yusfa, Kamis (8/3).

Yusfa mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) tak bisa menutup aplikasi yang tak melengkapi izin tersebut. Karena yang bisa menindaklanjuti adalah kominfo.

"Saran kami kalau ditemukan hal-hal yang tidak menyenangkan silahkan laporkan ke pihak berwajib. Jangan melakukan tindakan sendiri yang memunculkan kriminalitas," tutupnya. (wie/rus/dra)